

## KETERKAITAN DESA KOTA : SEBUAH ALTERNATIF PEMBANGUNAN DI WILAYAH PEDESAAN

### *RURAL URBAN RELATIONSHIPS : AN ALTERNATIVE FOR RURAL DEVELOPMENT*

Maryadi

Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing, BPPT  
Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi, PUSPIPTEK , Tangerang Selatan  
E-mail : [maryadi@yahoo.com](mailto:maryadi@yahoo.com)

Diterima (received) : 04-05-2015, Direvisi (reviewed) : 25-05-2015

Disetujui (accepted) : 01-07-2015

#### **Abstrak**

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan pembangunan wilayah pedesaan sebagai akibat adanya hubungan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan. Di Indonesia hubungan itu lebih disebabkan oleh adanya kegiatan di bidang pertanian mengingat sebagian besar penduduk pedesaan masih bekerja di sektor pertanian, sementara faktor produksi yang diperlukan berada di wilayah perkotaan. Seperti diketahui pada saat ini terdapat saling ketergantungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan yang seimbang dan saling mendukung untuk pembangunan kedua daerah itu. Pemikiran bahwa pembangunan pedesaan berbeda dari pembangunan perkotaan sudah tidak berlaku lagi. Perspektif baru menyebutkan pembangunan pedesaan akan lebih cepat bila hubungan antara pedesaan-perkotaan semakin erat. Hal ini berkaitan dengan fakta ekonomi yang berkembang dalam bentuk pergerakan barang, orang serta modal yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

**Kata kunci :** Ketimpangan, pembangunan, desa, kota.

#### **Abstract**

*This article explained the development in rural area as a result of relationships between rural and urban regions. In Indonesia the relationships particularly influenced by agricultural activities in rural areas. As we know majority of rural people in Indonesia are still work in agricultural sector meanwhile production factors provided by urban people. It is also widely recognized that there exists an economic, social and environmental interdependence between urban and rural areas and a need for balanced and mutually supportive approach to development of the two areas. The discrete consideration of rural development as completely distinct from urban development is no longer valid. A new perspective, referred to as the rural-urban linkage development approach, is increasingly becoming the accepted approach. Rural-urban linkage generally refers to the growing flow of public and private capital, people (migration and commuting) and goods (trade) between urban and rural areas.*

**Keyword :** *Inequality, development, village, town*

#### **1. PENDAHULUAN**

Pada awal dasawarsa 60-an banyak negara sedang berkembang di kawasan Asia dan Amerika Selatan berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara maju dengan cara mengadopsi pemikiran Francois Perroux melalui konsep *growth pole* atau *pole de noissance* (Boudeville, 1966:2; Christofakis, M and A. Papadaskalopoulos, 2011:5). Konsep itu

menjelaskan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi investasi harus ditempatkan di wilayah yang memiliki potensi cepat tumbuh, yaitu wilayah perkotaan. Dengan cara ini wilayah perkotaan akan berkembang dengan cepat dan selanjutnya akan merangsang pertumbuhan wilayah pedesaan melalui efek menyebar (*spread effect*) atau efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*). (Komarovskiy, V dan V. Bondaruk, 2013: 12 )

Penerapan pemikiran Perroux ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Penyebab utamanya adalah kurangnya infrastruktur pendukung. Di beberapa negara investasi memang berjalan dengan baik. Ekonomi tumbuh cukup pesat dan membuka peluang kerja cukup besar. Namun sayangnya investasi dalam bentuk industri itu banyak yang gagal menyebarkan dan merembeskan hasil pembangunan dari pusat-pusat pertumbuhan yang dimaksud. Yang terjadi justru kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah pedesaan dengan perkotaan seperti yang terjadi di India (Lipton, 1977:13; Gillis, 1983:8; Gore, 1984:9)

Apa yang terjadi di India ternyata juga ditemukan di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat pada pembangunan industri besar di Lhok Seumawe, NAD. Di wilayah itu keterkaitan antara industri besar dengan daerah sekitarnya sangat kecil, bahkan dapat dikatakan tidak ada (Chatani, 2010:4).

Melihat kegagalan yang ada, konsep pusat-pusat pertumbuhan ini akhirnya ditinggalkan dan kemudian muncul konsep *Integrated Rural Development* yang lebih menitikberatkan pada pembangunan pedesaan melalui pengembangan sektor pertanian. Dalam konsep ini pembangunan pedesaan bersumber pada potensi masyarakat setempat dan memprioritaskan kepentingan golongan miskin.

Sayang konsep ini terlalu menitikberatkan pada intensifikasi tanaman pangan yang tidak memiliki daya untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi lain di luar sektor pertanian sehingga ditinggalkan. Akhirnya pada dasawarsa 70-an muncul sebuah konsep baru yang disampaikan oleh Douglass (1979:6) yang disebut model keterkaitan desa – kota (*rural – urban linkages*), yaitu suatu konsep pembangunan untuk menghasilkan keseimbangan lingkungan pembangunan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan. Menurut Douglass pembangunan di kedua wilayah tidak boleh dipisahkan tetapi harus dibangun secara bersamaan mengingat bahwa pembangunan desa merupakan suatu interaksi antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan dorongan luar.

Pembangunan desa akan selalu terkait dengan proses perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun global. Setiap perubahan yang terjadi akan berdampak langsung pada seluruh kehidupan masyarakat pedesaan. Sehingga pembangunan desa hanya dapat tercapai apabila kegiatan pembangunan di wilayah pedesaan selalu dikaitkan dengan pembangunan kota karena keterkaitan desa dengan kota adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan arus balik dana atau kapital yang selama ini mengalir dari desa ke kota menjadi dari kota ke desa. Demikian pula arus balik produk atau jasa dari kota ke desa menjadi dari desa ke kota. (Indrawati, S.M. 2014:11)

## 2. KETERKAITAN DESA KOTA

Keterkaitan antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan sebenarnya telah lama terjadi. Sebut saja misalnya petani sayur di kawasan Puncak yang secara tradisional selalu membawa hasil panennya ke pasar-pasar di kota Bogor. Sekembali dari kota-kota, para petani ini membawa berbagai kebutuhan rumah tangga yang tidak dihasilkan di desanya. Ada suatu realitas yang telah berjalan selama ini bahwa penduduk desa menjadi konsumen barang dan jasa pelayanan perkotaan sementara masyarakat kota juga menjadi konsumen jasa dan barang hasil produksi pedesaan (ESCAP, 2002:7)

Berdasar pada kondisi seperti itu Tacoli (2004:19) membagi hubungan desa kota menjadi dua. Yang pertama hubungan yang berbentuk lintas batas (*linkages across space*) manusia, uang (dana), barang dan jasa. Sedangkan yang kedua dalam bentuk hubungan antar sektor (*sectoral interactions*) seperti adanya kegiatan industri di pedesaan yang memanfaatkan bahan baku dari daerah pedesaan itu sendiri namun bahan penunjangnya didatangkan dari perkotaan. Atau semua bahan baku berasal dari perkotaan namun keseluruhan aktifitas dilakukan di desa oleh penduduk desa itu sendiri.

Rondinelli (1985:18) menjelaskan tipe keterkaitan desa kota sebagai berikut:

1. keterkaitan fisik (jaringan jalan, irigasi, transportasi),
2. keterkaitan ekonomi (pasar, produksi, konsumsi, modal, pendapatan, aliran komoditas sektoral dan interregional),
3. keterkaitan mobilitas penduduk,
4. keterkaitan teknologi,
5. keterkaitan interaksi sosial,
6. keterkaitan penyediaan pelayanan,
7. keterkaitan politik, administratif, dan organisasi-sasional.

Tipe keterkaitan berkaitan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Daerah yang relatif terbelakang biasanya masih mengandalkan keterkaitan konsumsi dan jasa tradisional. Sedangkan wilayah yang sudah maju lebih terfokus pada keterkaitan produksi dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kompleks. Sementara itu, keterkaitan finansial akan melanda semua wilayah bersamaan meningkatnya proses desentralisasi (otonomi).

Adapun yang disebut dengan *forward linkages* disini adalah suatu keterkaitan yang terjadi karena adanya pengeluaran penduduk pedesaan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari melalui penjualan hasil pertaniannya di perkotaan. Sedangkan *backward linkages* adalah keterkaitan

karena adanya pembelian sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain) oleh penduduk pedesaan untuk kepentingan peningkatan produksi.

Menurut Herman Haeruman, seperti yang dikutip Tarigan (2003:20), secara tradisional hubungan desa-kota diindikasikan dengan adanya aliran produk atau jasa perkotaan yang harus "dibayar" oleh masyarakat pedesaan melalui aliran dana atau kapital dari desa ke kota. Kondisi ini secara umum dikenal dengan rendahnya nilai tukar (*terms of trade*) produk atau jasa masyarakat pedesaan terhadap produk atau jasa perkotaan. Pendekatan keterkaitan desa kota diharapkan dapat menaikkan nilai tukar produk atau jasa masyarakat pedesaan melalui :

- (1) upaya memindahkan proses produksi dari kota ke desa untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat pedesaan melalui bantuan modal, sarana produksi dan pelatihan;
- (2) memperpendek jalur produksi, distribusi, dan pemasaran produk/jasa masyarakat pedesaan untuk mengurangi biaya ekonomi tinggi melalui pembentukan satuan partisipatif bagi pengembangan produk/jasa secara spesifik. Jasa ini dibangun di perkotaan;
- (3) memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat pedesaan terhadap faktor-faktor produksi barang/jasa seperti modal, bahan baku, teknologi, sarana dan prasarana. Hal ini akan merangsang SDM di pedesaan untuk lebih produktif dalam mengembangkan usahanya, sehingga desa memiliki daya tarik untuk investasi produksi dan tenaga kerja. Di samping itu adanya dukungan informasi khususnya informasi pasar.

Bersamaan dengan dinamika pembangunan, keterkaitan desa-kota mengalami perubahan substansi dan bentuk. Karenanya selalu terdapat berbagai variasi keterkaitan, baik di dalam suatu wilayah, di dalam suatu negara, maupun antar wilayah dan antar negara. Hal itu sangat bergantung pada faktor pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah bersangkutan. Untuk itu, keterkaitan perlu diperlakukan sesuai kondisi suatu wilayah tanpa perlu menerapkan generalisasi. Keterkaitan desa-kota perlu dipahami dalam suatu rentang wilayah yang relatif tanpa batas.

### 3. PEMBANGUNAN DESA

Walaupun sepenuhnya disadari akan arti penting keterkaitan pembangunan desa kota namun yang lebih penting adalah bagaimana mewujudkan keterkaitan ekonomi tersebut seperti terbangunnya

akses ke pasar, penguasaan informasi & teknologi, jaringan pemasaran, berkembangnya jaringan kerja produksi, pengolahan dan pemasaran, distribusi input, modal, sumber daya manusia profesional sebagai prasyarat kunci untuk membangun pedesaan (Akkoyunlu, S. 2013:1).

Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa sektor pertanian tampaknya masih tetap menjadi fokus perhatian mengingat sektor ini masih sangat dominan di pedesaan. Produksi pertanian tetap harus ditingkatkan karena secara logika peningkatan produksi akan menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini secara otomatis akan mendorong masyarakat untuk membeli barang-barang di perkotaan atau barang-barang yang dihasilkan di perkotaan. Sehingga semakin tinggi pendapatan masyarakat pedesaan akan semakin erat pula hubungan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan. Akan semakin banyak penduduk desa ke wilayah perkotaan untuk membeli berbagai kebutuhan. Demikian juga akan semakin banyak pula penduduk perkotaan pergi ke pedesaan untuk menawarkan berbagai barang atau jasa yang mungkin dibutuhkan penduduk pedesaan. Selain itu produk pertanian yang melimpah juga akan mendorong timbulnya berbagai aktifitas ekonomi di perkotaan seperti industri pengolah, jasa perdagangan, jasa perbankan dan lain sebagainya. (Braun, J. 2006:3 ; Ibrahim, M.B 2014: 10;).

Untuk meningkatkan produksi pertanian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang terutama tentunya adalah tersedianya sarana produksi pertanian yang memadai baik berupa benih, pupuk maupun obat-obatan pemberantas hama dan penyakit. Sarana ini harus dapat diperoleh oleh para petani tepat waktu agar sistem pertanian dapat berjalan sesuai dengan waktu atau jadwal penanaman yang sudah ada. Apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, baik dalam hal jumlah maupun waktunya, sangat mungkin produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ambil contoh misalnya dalam hal pemupukan. Kalau sudah waktunya untuk memupuk namun pupuk yang dibutuhkan tidak tersedia, atau kalau tersedia jumlahnya juga tidak sesuai dengan kebutuhan dapat diduga hasil panennya nanti akan berada di bawah kapasitas produksi. Oleh karena itu dalam rangka menunjang produksi para pedagang sarana produksi di perkotaan hendaknya mengetahui jadwal tanam petani sehingga persediaan sarana produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk menunjang kegiatan produksi dan juga kegiatan lain jasa keuangan yang semula terkonsentrasi di perkotaan juga harus masuk ke pedesaan. Dengan adanya jasa perbankan petani dapat segera menyimpan uang hasil penjualan hasil panennya untuk kemudian menggunakannya sesuai

dengan kebutuhan. Dalam hal-hal tertentu petani juga dapat pinjam uang ke bank tanpa harus terlilit hutang pada rentenir atau para pengijon. Yang patut diperhatikan bank hendaknya lebih banyak menyediakan kredit untuk keperluan produksi dibandingkan konsumsi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini banyak pemilik bank lebih suka menyediakan kredit pembelian sepeda motor dibandingkan dengan alat perontok gabah mengingat sepeda motor itu mudah untuk dijual lagi bila kreditor tidak dapat melunasi hutangnya.

Sementara itu dalam hal pemasaran produk, rantai pemasaran yang masih terlalu panjang perlu dipotong misalnya dengan mendirikan terminal agribisnis. Di dalam terminal itu penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung. Sebuah hasil penelitian di Kenya menunjukkan bahwa petani yang menjual produk pertaniannya langsung ke wilayah perkotaan kondisi ekonominya jauh lebih baik dibandingkan dengan petani yang hanya memasarkan hasilnya di desa.

Untuk menunjang pemasaran, keterkaitan sistem transportasi dapat diwujudkan dengan mendirikan jasa angkutan di wilayah pedesaan. Atau paling tidak ada informasi tempat penyewaan truk dan sarana transportasi lainnya sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengangkut hasil panen dapat segera dihubungi. Sistem seperti ini telah berlaku di Turi, Sleman, Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai produsen buah dan bibit salak pondoh. Apabila ada pembeli dari luar daerah yang memerlukan truk, dengan segera akan ditunjukkan perusahaan ekspedisi yang dapat dipercaya termasuk biaya angkutnya. Dengan cara ini keraguan akan biaya angkut sesungguhnya dapat dihilangkan.

Selain faktor sarana produksi, untuk meningkatkan produksi perlu adanya keterkaitan inovasi teknologi dimana inovasi umumnya berasal dari perkotaan. Nugroho dan Dahuri (2002:15) menyebutkan adanya dua alasan penting mengapa inovasi itu umumnya lahir di perkotaan. Pertama, karena faktor permintaan. Di wilayah perkotaan inovasi baru yang masih dalam proses maupun sudah menjadi produk akan segera mendapat penghargaan. Selain itu permintaan akan inovasi baru juga sangat tinggi karena tingkat aglomerasi di perkotaan sangat tinggi untuk mengaplikasikan produk baru. Kedua, adanya faktor persediaan. Inovasi cenderung produktif di perkotaan karena adanya berbagai bidang yang mendukung seperti jasa konsultasi, telekomunikasi, laboratorium dan lain sebagainya.

Selanjutnya keduanya juga menyebutkan bahwa proses penyebarannya dapat dipisahkan menjadi tiga. Pertama, inovasi menyebar dalam pola radial ke wilayah yang berdekatan. Cara ini terjadi pada inovasi yang berorientasi kepada kepentingan konsumen yang mana inovasi akan menyebar dari

pusat kota ke wilayah sub urban. Mekanismenya terutama karena alasan kedekatan jarak dan didukung hubungan personal. Kedua, inovasi menyebar secara lateral ke kota-kota yang memiliki sifat yang sama sehingga kota yang sejenis itu dapat menerima atau mereplikasi. Sebagai contoh, teknologi baru dalam industri percetakan hanya dapat ditiru oleh kota-kota yang tingkatan teknologinya relatif sama. Ketiga, inovasi menyebar melalui hierarki perkotaan internal. Inovasi menyebar dari pusat kota melalui ikatan ekonomi ke kota-kota yang berukuran lebih kecil. Proses penyebarannya dapat melalui perusahaan atau instansi pemerintah (Olfert, R. 2008: 16).

Sementara itu implikasi dari inovasi terhadap perkembangan wilayah sangat nyata. Dilihat dari skala waktu sejak inovasi dilahirkan hingga aplikasinya dalam skala ekonomi, proses penyebaran inovasi menyajikan apa yang disebut dengan mekanisme pemilahan industri (*industrial filtering*). Mekanisme ini menggambarkan bahwa kota metropolitan hanya berlaku sebagai pembuat inovasi. Sedangkan rekayasa teknologi produksi hanya terjadi pada tahap awal. Ketika teknologi dari inovasi sudah dipahami, kegiatannya menjadi rutin dan selanjutnya proses produksi mulai bergeser ke wilayah yang secara administratif berada di bawahnya (termasuk pedesaan).

Khusus di sektor pertanian inovasi baru selain berasal dari lembaga penelitian juga berasal dari industri benih, obat-obatan dan pupuk. Pada saat ini ada kecenderungan di kalangan petani untuk menggunakan benih hibrida karena produksinya jauh lebih tinggi. Namun karena benih tersebut tidak dapat diduplikasi petani tidak dapat mandiri dalam menyediakan benih. Dari satu sisi kondisi ini memang sangat menguntungkan dua belah pihak. Petani memperoleh keuntungan dengan peningkatan produksi sedangkan produsen memperoleh keuntungan dari penjualan benih.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tipe keterkaitan berkaitan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Sampai saat ini keterkaitan yang ada di Indonesia masih didominasi keterkaitan konsumsi dan jasa tradisional mengingat sebagian besar wilayah pedesaan di Indonesia masih berupa desa tradisional. Hanya sebagian kecil saja yang sudah lebih terfokus pada keterkaitan produksi dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kompleks.

Di pulau Jawa kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa sebagian besar hanya mengusahakan tanaman pangan yang berupa padi sebagai usaha taninya. Padahal tanaman ini hampir tidak ada kaitan ke depan dengan suatu kegiatan industri. Hal ini berbeda dengan yang ada di luar pulau Jawa karena telah banyak petani yang menanam tanaman industri yang memiliki

keterkaitan dengan industri, seperti misalnya petani sawit, karet atau kakao.

Walaupun demikian harus diakui bahwa keterkaitan teknologi di pulau Jawa relatif lebih erat dibandingkan dengan yang ada di luar pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat adopsi teknologi yang ada selama ini. Di Sulawesi Selatan yang tingkat penerapan teknologinya dianggap paling maju di wilayah Indonesia bagian Timur menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penerapan teknologi untuk tanaman padi masih sekitar 65%. Sedangkan untuk jagung 40%, kedelai 75%, dan kakao 60% (Peragi, 1992:17). Namun demikian karena di pulau Jawa lahannya relatif sempit, berapapun besarnya tingkat adopsi teknologi tetap saja tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan secara nyata. Hal ini tentunya berbeda dengan yang akan terjadi di luar Jawa. Apabila adopsi teknologi ditingkatkan bersamaan dengan perluasan areal, niscaya akan terjadi keseimbangan pembangunan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan. Contoh yang sangat mudah dilihat adalah peningkatan kesejahteraan petani kakao di Sulawesi Tenggara. Mengingat komoditas ini merupakan komoditas ekspor, tidak hanya pedagang di kota Kendari yang menikmati hasil penjualan kakao tersebut, tetapi juga para petani di pedesaan.

Kebutuhan penduduk masing-masing kota barangkali juga berbeda. Penduduk Jakarta yang sudah semakin sadar akan kesehatan tentunya akan berbeda dengan kebutuhan penduduk kota Makasar. Kalau saat ini penduduk Jakarta mulai mencari produk-produk pertanian yang ditanam tanpa menggunakan bahan kimia (*organic farming*), bagi penduduk Makasar produk semacam ini mungkin belum terlalu dibutuhkan. Oleh karena itu keterkaitan pembangunan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat.

Dengan keterbatasan lahan pertanian yang ada di pulau Jawa langkah yang paling ideal untuk mengembangkan wilayah pedesaan tentunya adalah melalui pengembangan industri yang bahan bakunya berasal dari desa setempat atau didatangkan dari wilayah perkotaan. Pembangunan desa Tanggulangin di Kabupaten Sidoarjo mungkin dapat dianggap sebagai cerita sukses pembangunan pedesaan karena wilayah tersebut telah tumbuh sebagai sentra industri kerajinan kulit dan sejenisnya yang bahan bakunya didatangkan dari perkotaan. Demikian pula dengan beberapa desa di Kabupaten Pati yang berkembang karena industri kuningan.

Sebaliknya pengolahan sawit yang dilakukan oleh penduduk di beberapa desa di Sumatera dengan cara membangun pabrik sawit skala mini dan hasil olahannya yang berupa CPO yang dipasarkan di wilayah perkotaan sebagai bahan baku industri minyak, sabun dan lain sebagainya juga

menunjukkan adanya hubungan pembangunan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa sampai saat ini keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial antara wilayah pedesaan dengan perkotaan masih lemah. Kondisi ini tercermin dari kurangnya keterkaitan antara sektor pertanian (*primer*) dengan sektor industri (*pengolahan*) dan jasa penunjang, serta keterkaitan pembangunan antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan. Kota-kota kecil dan menengah yang berfungsi melayani kawasan pedesaan di sekitarnya belum berkembang sebagai pusat pasar komoditas pertanian; pusat produksi, koleksi dan distribusi barang dan jasa; pusat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah non pertanian; dan penyedia lapangan kerja alternatif (*non pertanian*). (Mulyana, W 2014:14). Untuk itu salah satu upaya untuk mewujudkan keterkaitan wilayah pedesaan dengan perkotaan seperti yang diharapkan adalah dengan menjadikan kota-kota kecil dan menengah yang sering disebut dengan *secondary city* menjadi jembatan penghubung keduanya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu di Jawa Timur dengan membangun sebuah terminal agrobisnis untuk menampung hasil panen petani sayur di wilayah pedesaan sekitarnya dan sekaligus menjadi tempat transaksi dengan para pedagang besar dari kota besar seperti Malang dan Surabaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akkoyunlu, S. (2013) The Potential of Rural-Urban Linkages For Sustainable Development and Trade. Working paper no 2013/37/ December 2013. Swiss National Centre of Competence in Research
- Boudeville, J.R. (1966). Problems of Regional Economic Planning. Edinburg University Press.
- Braun, J. (2006) Rural Urban Linkage for Growth, Employment and Poverty Reduction. International Food Research Policy Institute. World Bank Rural Day. Washington DC. November 6. 2006.
- Chatani, M. (2010). Analisis Kesenjangan Ketrampilan di Aceh. Bahan diskusi. Kantor ILO-Jakarta.
- Christofakis, M and A. Papadaskalopoulos, (2011) The Growth Poles Strategy In Regional Planning: The Recent Experiences Of Greece. Theoretical and Empirical Researches in

- Urban Management. Vol 6 Issue 2 / May 2011
- Timur Jangka Panjang II. Perhimpunan Agronomi Indonesia.
- Douglass, M. (1979). Agropolitas Development : An Alternative for Regional Development in Asia. Development Studies Occasional Paper No. 59. University of East Anglia.
- Rondinelli, D (1985). Locational Planning and Regional Economic Development: Appropriate Methods in Developing Countries. Sage Journal Online.
- ESCAP. (2002). Rural-Urban Linkages and the Role of Small and Medium-size Towns in Development : Issues, Concept and Policies. Siem Reap, Cambodia. Final Version.
- Tacoli, C. (2004). Bridging the divide : Rural-urban Interactions and Livelihood Strategies. Gatekeeper Series No. 77. IIED
- Gillis, M. et.al (1983). Economics of Development. W.W. Norton & Company. New York, London.
- Tarigan, A (2003). Rural-Urban Economic Linkages. Konsep & Urgensinya Dalam Memperkuat Pembangunan Desa. Jurnal Forum Inovasi. Maret-Mei 2003.
- Gore, C. (1984). Regions in Question. Methuen London and New York.
- Ibrahim, M.B ( 2014). Development without Intervention: A Successful Self-Reliance Initiative of Rural Development and Urban Growth in The Sudan Geographical Review. Volume 104, Issue 4, pages 481–505, October 2014.
- Indrawati, S.M. 2014. Urbanization and Urban-Rural Integrated Development. China Development Forum. Beijing, China. March 23, 2014
- Komarovskiy, V dan V. Bondaruk, (2013). The Role Of The Concept Of “Growth Poles” For Regional Development Jurnal of Public Administration, Finance and Law. Issue 4/2013
- Lipton, M. (1977). Why Poor Stay Poor : A Study of Urban Bias In World Development. Maurice Temple Smith. London.
- Marino, L.D (2009). Urban-rural Linkages Fostering Sustainable Development : The Rural Development Perspective. Seminar “ Urban Rural Linkages Fostering Sustainable Development. Brussels, 23 January 20019.
- Mulyana, W (2014). Rural Urban Linkages: Indonesia Case Study. Working Paper Series N° 126 . Working Group: Development with Territorial Cohesion. Territorial Cohesion for Development Program. Rimisp, Santiago, Chile.
- Nugroho, I. dan R. Dahuri (2002). Pembangunan Wilayah. Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan .LP3ES. Jakarta.
- Olfert, R. (2008). Rural-Urban Symbiosis.. The Illative Blog. A Knowledge Impact Society
- PERAGI (1992). Industrialisasi Pertanian Pemacu Pembangunan Pertanian Indonesia Wilayah